

PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hairul Anam, Yanzil Azizil Yudaruddin, Dyah Andryani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan, Balikpapan
email: dyahandryani96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel yang digunakan adalah DAU, DAK dan PAD sebagai variabel bebas dan Belanja Modal sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan adalah data ABPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sampai dengan 2019. Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds and on Capital Expenditures in Regencies/Cities in East Kalimantan Province. The variables used are DAU, DAK and PAD as independent variables and Capital Expenditure as the specified variable. The sample used is Regency/City ABPD data in East Kalimantan Province from 2017 to 2019 through the website www.bps.go.id. The analytical tools used are Classical Assumption Model Test, Multiple Regression Analysis, F Test, t Test, and Coefficient of Determination. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it was found that Regional Original Income had no effect on Capital Expenditures, General Allocation Funds had an effect on Capital Expenditures, and Special Allocation Funds had an effect on Capital Expenditures.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Daerah otonom atau biasa disebut juga sebagai otonomi daerah (Otda) merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan. Tidak hanya itu, dengan Otda dapat membuat pemerintah daerah berada dalam kondisi yang lebih baik dan dapat memobilisasi sumber daya secara mandiri sehingga dapat mencapai tujuan dalam peningkatan pembangunan daerah (Syukri & Didiharyono, 2018).

Maka untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pendanaan yang bersumber dari pendanaan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pengertian APBD dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. Dalam sudut pandang keagenan hal ini merupakan sebuah kontrak (*Incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legeslatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Sudika & Budiarta, 2017).

Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia (2010) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Pengukuran variabel belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini diukur dengan skala rasio. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah (Heliyanto & Handayani, 2016).

Menurut Data Perimbangan untuk mengetahui cara perhitungan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan dengan perhitungan (Hermawan & Made, 2016):

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Indikator DAU adalah sebagai berikut (Hermawan & Made, 2016):

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata- rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM)

Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran DAU dapat dilakukan dengan perhitungan (Hermawan & Made, 2016):

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

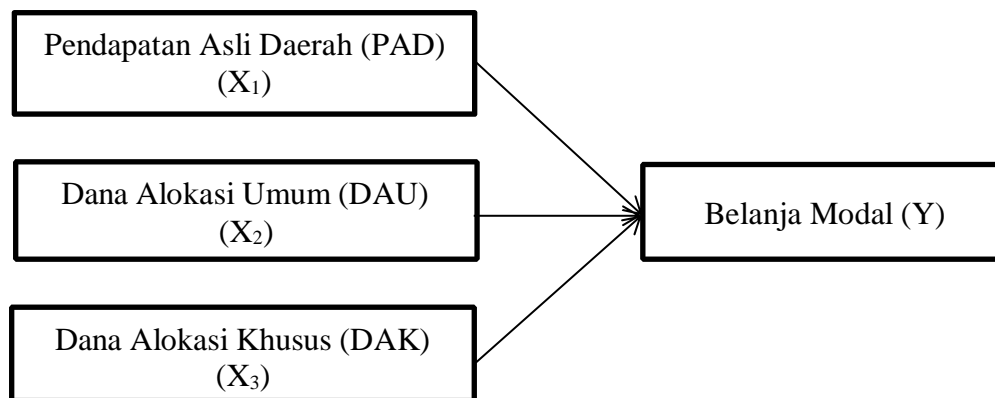
AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (Surakhman et al., 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:17). Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber data berasal dari dokumen Laporan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur periode tahun 2017, 2018 dan 2019, yaitu melalui www.bps.go.id. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 3 Kota dan 7 Kabupaten dengan data penelitian tahun 2017, 2018, dan 2019 yang terdaftar di www.djpk.kemenkeu.go.id.

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Penjelasan bahwa populasi penelitian merupakan seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur maka digunakan metoda pemilihan sampel penelitian ini merupakan metode sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi diperlukan untuk sampel penelitian. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur termasuk

dalam sampel penelitian ini. Dalam penelitian ini yaitu Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD dan laporan realisasi APBD. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum dan maksimum. Tujuan dari uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif, agar memperoleh gambaran mengenai Kabupaten/Kota yang disajikan sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sujarweni, 2015:29). Uji membahas data dan hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Berikut ini disajikan rangkuman mengenai deskriptif masing-masing variabel dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	30	16.31	20.38	18.9405	1.00743
Dana Alokasi Umum	30	18.77	20.45	19.8366	.43110
Dana Alokasi Khusus	30	17.94	19.83	18.7879	.50065
Belanja Modal	30	19.22	20.85	20.1238	.41785
Valid N (listwise)	30				

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitasnya menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan jika signifikansinya kurang dari $\alpha = 0,05$ maka data tidak normal dan jika signifikansinya lebih dari $\alpha = 0,05$ maka data normal. Adapun uji normalitas dengan uji *one sample kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26548253
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.069
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Hasil pengujian data penelitian dengan menggunakan metode uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel di atas menunjukkan nilai sebesar 0,200. Dikarenakan memiliki nilai signifikansi yang lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linier apakah ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW test). Hasil pengujian autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil autokorelasi dengan Durbin Watson

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	0.596	0.55	0.28038	2.265

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Tabel 4.4
Ringkasan Uji Autokorelasi

Du	DW	4-Du	Keterangan
1,650	1,214	2,35	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan hasil analisis autokorelasi dengan metode *Durbin Watson* dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) pada table 4.3 menunjukkan bahwa nilai Dw sebesar 2,265 lebih besar dari Du (1,650) dan kurang dari 4-Du (2,35), maka dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	0.847	1.180
	Dana Alokasi Umum	0.995	1.005
	Dana Alokasi Khusus	0.849	1.179

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki angka Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varince residual dari satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan uji glejser. Hasil pengujian dengan uji glejser dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	2.081	1.715				1.213
Pendapatan Asli Daerah	-0.033	0.031	-0.213	-1.039	0.308	0.847	1.180
1 Dana Alokasi Umum	-0.072	0.068	-0.2	-1.061	0.298	0.995	1.005
Dana Alokasi Khusus	0.009	0.063	0.029	0.144	0.887	0.849	1.179

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai signifikan (Sig) untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,308, untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,298, dan untuk variabel Dana Alokasi Khusus adalah 0,887. Karena nilai signifikan ketigavariabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus kemudian variabel dependennya Belanja Modal. Hasil pengujian dengan uji glejser dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	2.662	3.073				0.866
Pendapatan Asli Daerah	0.099	0.056	0.238	1.758	0.091	0.847	1.180
1 Dana Alokasi Umum	0.35	0.121	0.361	2.888	0.008	0.995	1.005
Dana Alokasi Khusus	0.461	0.113	0.552	4.08	0,000	0.849	1.179

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Hasil yang diperoleh dalam analisis ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 pada analisis regresi secara ringkas mencakup persamaan regresi linier berganda. Dalam koefisien regresi menunjukkan hasil analisis persamaan regresi yang dapat dibentuk persamaannya sebagai berikut:

$$BM = 2,662 + \beta 0,099PAD + \beta 0,350DAU + \beta 0,461DAK + \varepsilon$$

Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,662 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0, X_2=0, X_3=0$), maka alokasi Belanja Modal sebesar 2,662.
2. Koefisien regresi PAD bertambah sebesar 0,099, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 0,099 atau 9,9%.
3. Koefisien regresi DAU bertambah sebesar 0,350, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 0,350 atau 35%.
4. Koefisien regresi DAK bertambah sebesar 0,461, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAK sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 0,461 atau 46,1%.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t

Ghozali (2018:150) menunjukkan uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial harga dan kualitas berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Uji statistik T

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.662	3.073		0.866	0.394		
1							
Pendapatan Asli Daerah	0.099	0.056	0.238	1.758	0.091	0.847	1.180
Dana Alokasi Umum	0.35	0.121	0.361	2.888	0.008	0.995	1.005
Dana Alokasi Khusus	0.461	0.113	0.552	4.08	0,000	0.849	1.179

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Hasil perhitungan statistik tersebut menggambarkan hasil pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap

variabel dependen, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t dengan tingkat signifikan 0,091 lebih besar dari 0,05 artinya secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dengan demikian H_1 ditolak.
2. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai t dengan tingkat signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial mempunyai pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dengan demikian H_2 diterima.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial mempunyai pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dengan demikian H_3 diterima.

Uji Statistik F

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	3.019	3	1.006	12.802	.000 ^b
	Residual	2.044	26	0.079		
	Total	5.063	29			

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 12,802 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap variable dependen Belanja Modal.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Mengukur sebuah regresi yang baik atau tidak, penelitian ini menggunakan nilai R^2 . Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	0.596	0.55	0.28038	2.265

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,596 atau yang berarti bahwa sebesar 59,6% variasi Belanja Modal mampu dijelaskan oleh variasi tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya sebesar 40,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini nilai signifikansi secara parsial (sendiri-sendiri) dari masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perolehan t_{hitung} untuk Pendapatan Asli Daerah adalah 1,758 jika dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 2,052 ($1,758 < 2,052$) dan nilai signifikansi lebih besar $0,091 > 0,05$ maka H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hal ini, maka dapat diartikan bahwa perkembangan belanja modal belum bisa dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan keseharian pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vanesha et al., (2019) bahwa bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan masih banyak potensi pajak yang belum tergali dan pemungutan pajak dan retribusi masih belum optimal dan kecilnya realisasi PAD yang diterima disebabkan beberapa faktor, sehingga aset dan potensi pajak serta retribusi saat ini tidak besar dan belum optimal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari & Wirama (2018) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dikarenakan pendapatan per kapita tidak memoderasi pengaruh PAD pada alokasi belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perolehan t_{hitung} untuk Dana Alokasi Umum adalah 2,888 jika dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 2,052 ($2,888 > 2,052$) dan nilai signifikansi lebih kecil $0,008 < 0,05$ maka H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berpengaruhnya Dana Alokasi Umum yang sangat besar sehingga berkontribusi besar terhadap pengalokasian belanja modal secara keseluruhan, semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, Hal ini disebabkan karena dana transfer yang dilakukan pemerintah adalah hal yang paling penting bagi pemerintah daerah karena tujuan dari transfer Dana Alokasi Umum untuk mengurangi kesenjangan dan stabilitas aktifitas keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Surakhman et al., (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap

Belanja Modal dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perolehan t_{hitung} untuk Dana Alokasi Khusus adalah 4,080 jika dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 2,052 ($4,080 > 2,052$) dan nilai signifikansi lebih kecil $0,000 < 0,05$ maka H_3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku Belanja Modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Retno (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal dapat memberikan penjelasan bahwa Pengaturan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, dan juga sejalan dengan penelitian Sudika & Budiarta (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal bahwa pengeluaran untuk infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, artinya dalam pengalokasian anggaran publik pemerintah daerah harus menangkap apa yang menjadi ekspektasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab terdahulu di penelitian ini, maka kesimpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa perkembangan belanja modal belum bisa dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan asli daerah yang terealisasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali pendapatan asli daerah yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyaknya pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas alokasi belanja modal menjadi meningkat.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota hendaknya lebih memaksimalkan Dana alokasi umum untuk dialokasikan ke belanja modal, seperti membiayai kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, karena tujuan awal Dana alokasi umum adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal skripsi penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., IPU., ASEAN.Eng selaku rektor Universitas Balikpapan.
2. Bapak Dr. H. Tamzil Yusuf, M.M selaku dekan Fakultas ekonomi yang secara administratif telah menunjang terlaksananya penulisan ini.
3. Bapak Yanzil Azizil Yударuddin, SE.,M.Acc.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Hairul Anam, SE., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan.
5. Seluruh Dosen, staf TU dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
6. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan suami sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 190–205.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro. 95-212.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 5(3), ISSN : 2460-0585. 1–17.
- Hermawan, A. D., & Made, A. M. D. W. Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(2), 1–11.
- Hoesada, J. (2016). Bunga Rampai : *Akuntansi Pemerintahan*. In *Jakarta: Salemba Empat*. 238.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja Daerah.” *Kementerian Keuangan*, 51(1), 212.
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah.

- Retno, N. D. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 23–35.
- Sari, D. M. M. Y., & Wirama, D. G. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi Desak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 22,3. *Mare*(9), ISSN: 2302-8556, 1689–1699.
- Sudika, i komang, & Budiarta, i ketut. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21 No. 2, ISSN: 2302-8556, Halaman 1689-1718, 21(2), 1689–1718.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 17-81.
- Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Kolegial*, 7(2), P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X. 150–166.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 55.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. 1–413
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), ISSN: 2085-1960. 27–36.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Wibisono, N., & Wildaniati, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(September), ISSN : 230-4747. 11–20.
- <https://bps.go.id/> diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 13.20 WITA sampai dengan Pukul 15.15 WITA.
- <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah> diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 21.24 WITA sampai dengan Pukul 22.00 WITA.
- www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 2 Maret 2021, Pukul 10.25 WITA.